

BAB IV

KESIMPULAN

Pada bagian ini, penulis membahas tentang kesimpulan dari penelitian sekaligus menjawab pertanyaan penelitian, yaitu ***“Bagaimana faktor-faktor idiosinkratik Joko Widodo berimplikasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia di Laut Natuna?”*** Penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor idiosinkratik dari Joko Widodo berpengaruh dalam kebijakan yang dikeluarkan Indonesia ketika menanggapi pelanggaran Tiongkok di Laut Natuna. Dengan menggunakan kerangka teori *The Big Five Personality Traits*, terdapat lima indikator yang dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian, yaitu *neuroticism*, *agreeableness*, *conscientiousness*, *openness to experience*, dan *extraversion*. Berdasarkan kerangka teori tersebut, penulis menemukan terdapat faktor idiosinkratik Joko Widodo yang berperan dalam pembentukan kebijakan luar negeri di Laut Natuna.

Pertama, dimensi *neuroticism*, dalam dimensi ini, penulis menggolongkan Joko Widodo memiliki tingkat *neuroticism* yang tinggi. *Neuroticism* adalah tingkat emosi yang dimiliki dan dikeluarkan oleh seseorang ketika dihadapkan pada suatu hal. Pemimpin dengan tingkat *neuroticism* yang tinggi cenderung menggunakan aspek militer dalam menghadapi suatu masalah. Hal ini terlihat dari ketika pihak Tiongkok menghiraukan nota protes yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Dalam menanggapi hal ini, Joko Widodo meningkatkan pertahanan, seperti mempersiapkan operasi siaga tempur yang dilakukan oleh TNI, mengerahkan kapal patroli untuk menembakkan dan menangkap kapal-kapal Tiongkok yang memasuki

Laut Natuna, mempersiapkan alutsista sebanyak 3 kapal perang, sebuah pesawat Boeing TNI AU, pesawat intai maritim dan 4 buah Kapal Perang Republik Indonesia.

Kedua, dimensi *agreeableness*, penulis menggolongkan Joko Widodo memiliki tingkat *agreeableness* yang sedang. *Agreeableness* sendiri adalah dimensi yang mengatur kerukunan seseorang dengan yang lain. Joko Widodo memiliki sifat *agreeableness* yang sedang terlihat dari dirinya yang tidak bersikap kaku dan selalu serius dalam setiap kondisi. Dirinya juga sering terlihat bercanda dan tertawa di depan kamera ketika berinteraksi dengan pejabat pemerintahan atau saat sedang melakukan kunjungan ke rumah warga. Citra yang dimilikinya adalah dirinya memiliki pembawaan diri yang santai dan murah senyum ketika berinteraksi dengan orang lain. Namun di sisi lain, Joko Widodo merupakan pribadi yang bersikap sesuai dengan kondisi yang terjadi. Ia tetap akan bersikap tegas ketika menghadapi berbagai permasalahan.

Dengan begitu, hal ini juga mempengaruhi keputusannya di Laut Natuna. Pada awalnya, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengirimkan nota protes terlebih dahulu kepada pihak Tiongkok. Selain itu, Indonesia juga mengupayakan perdamaian dengan cara melakukan diplomasi, seperti diplomasi preventif. Indonesia melakukan diplomasi preventif dengan mengadakan dialog informal dengan Tiongkok dalam membahas kepemilikan mengenai Laut Natuna. Tujuannya adalah agar konflik tersebut tidak menyebar menjadi permasalahan yang lebih luas dan hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok dan berjalan dengan baik tanpa adanya konflik. Selanjutnya, Indonesia juga melakukan diplomasi pertahanan

dengan negara-negara *great power* untuk menunjukkan kedaulatan Indonesia di Laut Natuna. Hal tersebut tetap tidak menyadarkan Tiongkok sehingga pada akhirnya, Indonesia memutuskan untuk meningkatkan pertahanan dalam merebut Laut Natuna dari Tiongkok.

Ketiga, dimensi *conscientiousness*, penulis menggolongkan Joko Widodo memiliki tingkat *conscientiousness* yang tinggi. *Conscientiousness* adalah dimensi kepribadian yang menekankan pada konsistensi seseorang dalam meraih apa yang diinginkan. Tingkat *conscientiousness* yang tinggi pada Joko Widodo dapat terlihat dari kepribadiannya yang tidak mudah menyerah. Dirinya yang lahir dari keluarga yang kurang mampu menyebabkan semasa kecilnya harus dihabiskan dengan berjualan kayu di pasar untuk membantu ekonomi keluarga. Selain itu, dirinya juga seorang pekerja keras terlihat dari Joko Widodo tidak putus asa dan tetap mencoba ketika bisnis kayu yang didirikannya bangkrut.

Kepribadian yang ia miliki berpengaruh terhadap keputusan kebijakan luar negeri di Laut Natuna. Joko Widodo memiliki sifat yang terpacu pada goals dan hal ini menyebabkan dirinya tidak berkompromi dengan kedaulatan Indonesia. Indonesia berjuang mempertahankan kedaulatan dengan membentuk peta baru yang memasukkan Laut Natuna sebagai bagian dari Indonesia sehingga pada tanggal 14 Juli 2017, Laut Natuna secara resmi berada di dalam peta Indonesia. Dalam menanggapi *illegal fishing* yang dilakukan kapal Tiongkok. Indonesia mempertahankan kedaulatan dengan melakukan patroli secara berkala dan tidak segan-segan melakukan penembakan maupun penangkapan terhadap kapal-kapal yang terbukti melakukan *illegal fishing* di kawasan ZEE Indonesia.

Keempat, yaitu dimensi *openness to experience*, penulis menggolongkan Joko Widodo memiliki tingkat *openness to experience* yang tinggi. *Openness to experience* adalah keterbukaan seseorang terhadap pengalaman dan keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru. Hal ini terlihat dari Joko Widodo pada saat masa kuliah mencoba hal-hal baru dengan mendaki gunung dan terlibat aktif di dalam organisasi pendaki gunung. Selain itu, setelah lulus kuliah ia juga bersedia ditempatkan di hutan saat bekerja di PT Kertas Kraft Aceh yang merupakan tempat baru baginya. Dalam ranah politik, Joko Widodo juga senantiasa mencoba menjadi Walikota Solo. Setelah beberapa tahun menjadi Walikota Solo, ia kembali dicalonkan oleh partainya menjadi Gubernur DKI Jakarta dan selanjutnya menjadi Presiden Indonesia. Dirinya yang suka mencoba hal-hal baru yang terbuka terhadap berbagai pengalaman berpengaruh terhadap keputusannya di Laut Natuna. Keterbukaan pengalaman Joko Widodo dalam kasus Natuna dapat terlihat dari dirinya menghadapi pelanggaran yang dilakukan dimana pada awalnya, Indonesia selalu menyelesaikan masalah secara damai serta mengutamakan diskusi dan kerjasama. Namun pada kasus ini, Indonesia memutuskan untuk melakukan sistem baru, seperti adanya pembentukan peta baru, meningkatkan pertahanan, dan Indonesia juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2022 yang memuat tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Laut Natuna Utara.

Kelima, yaitu dimensi *extraversion*, penulis menggolongkan Joko Widodo memiliki tingkat *extraversion* yang tinggi. *Extraversion* adalah dimensi kepribadian yang menekankan pada kemampuan seseorang ketika bersosialisasi dengan orang lain. Kepribadian Joko Widodo dalam *extraversion* dapat ditunjukkan melalui

dirinya yang gemar mengikuti berbagai aktivitas saat di tingkat universitas. Joko Widodo mengikuti organisasi Gerakan Mahasiswa serta aktif dalam mendaki gunung. Dalam masa pemerintahannya, dirinya juga sering melakukan kunjungan terhadap kawasan kumuh dan bersosialisasi dengan masyarakat setempat untuk mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat kecil secara langsung.

Dengan begitu, tingkat *extraversion* tinggi yang dimiliki Joko Widodo mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia di Laut Natuna. Hal ini dibuktikan ketika Joko Widodo memutuskan melakukan rapat terbatas bersama dengan menteri-menteri di Laut Natuna. Selain itu, Joko Widodo juga melakukan kunjungan ke Laut Natuna dengan tujuan melakukan peninjauan terhadap latihan TNI AU di Natuna. Kunjungan dan rapat yang dilakukan oleh Joko Widodo membuktikan bahwa ia adalah pribadi yang suka bekerja di dalam tim dan mudah bergaul.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor idiosinkratik dari Joko Widodo, yang dikaji menggunakan teori *The Big Five Personality Traits* memberikan pengaruh terhadap pembentukan kebijakan luar negeri Indonesia di Laut Natuna. Dengan metode penelitian dan penarikan data yang berbeda menunjukkan perspektif baru mengenai idiosinkratik Joko Widodo di Laut Natuna. Dengan begitu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap studi Hubungan Internasional, khususnya dalam mata kuliah kebijakan luar negeri yang terkait dengan pengambilan keputusan yang dihasilkan suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- “Analisa Respon Indonesia Terhadap Militerisasi Tiongkok Di Laut China Selatan Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014-2019.” *Paradigma POLISTAAT Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2019.
<https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v2i2.1911>.
- “Perpres No. 41 Tahun 2022.” Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses 12 Desember 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206049/perpres-no-41-tahun-2022>.
- “Perpres No. 41 Tahun 2022.” Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses 12 Desember 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206049/perpres-no-41-tahun-2022>.
- Arif, M. 2021. “Balancing with Jokowi’s Characteristics: A Neoclassical Realism Approach to Indonesia’s Foreign and Security Policies in the South China Sea.” *Journal of Asian Security and International Affairs* 8, no.3, 370–390.
<https://doi.org/10.1177/23477970211041455>.
- Armenia, Resty. “Jokowi Marah Namanya Dicatut Setya Novanto.” *nasional*, 7 Desember 2015.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151207194900-20-96599/jokowi-marah-namanya-dicatut-setya-novanto>.

- Aronson, G. 2013. "Policy Options in a Time of Transition: The US and the Israel-Palestine Conflict," *Middle East Journal* 67, no. 2, 249–56, <http://www.jstor.org/stable/43698048>.
- Arumsari, D. 2018. "Pengaruh Idiosinkratik Shinzo Abe Terhadap Upaya Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang dari Pasifisme Idealis Menjadi Pasifisme Proaktif." *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 7, no. 3, 59-69. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi73b2516703full.pdf>.
- Aulawi, Muhamad Haris, and Yodia Adriatami Edwina. "Sengketa Laut China Selatan Yang Bersinggungan Dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau." *Mimbar Keadilan* 16, no. 1 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.30996/mk.v16i1.6967>.
- Badan Pusat Statistik. diakses pada tanggal 4 Mei 2025. <https://www.bps.go.id/publication/2021/06/10/2f4516969cc6fa220892f170/statistik-perdagangan-luar-negeri-impor-2020-jilid-i.html>.
- Block, Jack. "The Five-Factor Framing of Personality and Beyond: Some Ruminations." *Psychological Inquiry* 21, no. 1 (2010): 2–25. <http://www.jstor.org/stable/25704842>.
- Buszynski, Lezek. "ASEAN, the Declaration on Conduct, and the South China Sea." *Contemporary Southeast Asia* 25, no. 3 (2003): 343–62. <http://www.jstor.org/stable/25798652>.

Ciot, M.G. 2016. "Idiosyncrasies in Trump's Foreign Policy Decision Making." *Analele Universității din Oradea Relații Internaționale și Studii Europene (RISE)*, 8, 43–60. <https://www.cceol.com/search/article-detail?id=519484>.

Cottam, Marta L. 2016. *Introduction to Political Psychology*. New York: Routledge.

Darmawijaya, Arman Sobary, Abdul Rivai Ras, and Broto Wardoyo. "Illegal Fishing Di Laut Natuna Utara: Upaya Penanganan Illegal Fishing Serta Para Pelaku Setelah Tertangkap." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 1 (2022): 63. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i1.6020>.

Darmayadi, A., dan Purnamasari, E. N. "The Indonesia – China Relations in the Natuna Sea Dispute Resolution: Struggle for Sovereignty." *Journal of Eastern European and Central Asian Research* 9, no. 1, 41-48. <https://doi.org/10.15549/jeecar.v9i1.870>, <https://www.proquest.com/scholarly-journals/indonesia-china-relations-natuna-sea-dispute/docview/2634087966/se-2>.

Darmayadi, Andrias, dan Ervina. 2022. "The Indonesia – China Relations in the Natuna Sea Dispute Resolution: Struggle for Sovereignty." *Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR)* 9, no. 1, 41–48. <https://doi.org/10.15549/jeecar.v9i1.870>.

DetikNews. “Kenapa Jokowi Menamakan Kabinetnya ‘Kabinet Kerja?’”
 detiknews. Accessed December 12, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-2730089/kenapa-jokowi-menamakan-kabinetnya-kabinet-kerja>.

Endah, Alberthiene. *Jokowi, menuju cahaya*. Solo: Tiga Serangkai, 2019.

Ernandi, Syafril. “Analisis Claim Nelayan Tiongkok Atas Traditional Fishing Ground Di Perairan Natuna.” *JUSTITIA JURNAL HUKUM* 1, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1166>.

Fauzan, Fauzan, Kamarulnizam Abdullah, and Mohammad Zaki Ahmad. “Border Security Problems in the Waters of the Natuna Islands: Between National Boundaries and Illegal Fishing.” *AEGIS: Journal of International Relations* 3, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.33021/aegis.v3i2.736>.

Feist, G.J. *The Psychology of Science and the Origins of the Scientific Mind*. Yale University Press. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=SIFwaW82VngC&oi=fnd&pg=PR7&dq=J.Feist+dan+G.J+Feist+psychology&ots=CNYG-PYWQRS&sig=ocvuAVPkNugYzint-yD9WuvqcQI&redir_esc=y#v=onepage&q=J.Feist%20dan%20G.J%20Feist%20psychology&f=false.

GUAN, ANG CHENG. “ASEAN, China and the South China Sea Dispute: A Rejoinder.” *Security Dialogue* 30, no. 4 (1999): 425–30. <http://www.jstor.org/stable/44472465>.

- Galih, Bayu. "Jokowi Marah 'Dwell Time' Pelabuhan Belawan Masih 7 Hingga 8 Hari." KOMPAS.com, September 13, 2016. <https://nasional.kompas.com/read/2016/09/13/12304531/jokowi.marah.dwell.time.pelabuhan.belawan.masih.7.hingga.8.hari>.
- Gao, Z. dan Bing Jia, B. 2013. "The Nine-Dash Line in the South China Sea: History, Status, and Implications." *American Journal of International Law* 107, no. 1, 98–123. <https://doi.org/10.5305/amerjintelaw.107.1.0098>.
- Hall dan Lindzey. 1998. "Theories of personality (4th ed.)." John Wiley & Sons Inc. <https://psycnet.apa.org/record/1998-06741-000>.
- Harini, Setyasih. "Kepentingan Nasional China dalam Konflik Laut Cina Selatan." *Transformasi* 14, no.21. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/214>.
- Haya, E. dan Muttaqin, L. 2022. "Analysing the Settlement of Maritime Sovereignty's Dispute Cases based on UNCLOS 1982." *Interdisciplinary Social Studies* 1, no.5.
- Hermawan Bangun, Budi. "Upaya Dan Peran ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 23. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31455>.
- Hidayat, Kevin Satria, and Aulia Srifauzi. "Peran Presiden Jokowi Dalam Menjaga Laut Natuna ." *Journal of International Relations (JoS)* 3, no. 1 (June 2023).

- Hudson, V. M. 2005. "Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations." *Foreign Policy Analysis* 1, no. 1, 1–30. <http://www.jstor.org/stable/24907278>.
- Humas. "Akhir Januari, Presiden Jokowi Akan Resmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nasional." Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 19 Januari 2015. <https://setkab.go.id/akhir-januari-presiden-jokowi-akan-resmikan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-nasional/>.
- Humas. "Alokasi Capai RP468 Triliun, Presiden: Dana Desa Pacu Pertumbuhan Ekonomi Di Desa." Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 29 Maret 2022. <https://setkab.go.id/alokasi-capai-rp468-triliun-presiden-dana-desa-pacu-pertumbuhan-ekonomi-di-desa/>.
- Humas. "Kunjungi Natuna, Presiden Jokowi Akan Pimpin Rapat Terbatas Di Atas Kri Imam Bonjol." Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 24 Juni 2016. <https://setkab.go.id/kunjungi-natuna-presiden-jokowi-akan-pimpin-rapat-terbatas-di-atas-kri-imam-bonjol/>.
- International Hydrographic Organization. "Limits of Oceans and Seas." Special Publication, PANGAEA. <https://epic.awi.de/id/eprint/29772/>.
- Jelvita, Fedila. *Semangat Kerja Karyawan Dan Gaya Kepemimpinan*, 2019. <https://doi.org/10.31227/osf.io/bh6ty>.
- Khairally, Elmy Tasya. "Pengertian Optimis Adalah: Ini Manfaat Dan Cirinya." *detikbali*. Diakses 12 Desember 2023.

<https://www.detik.com/bali/berita/d-6458849/pengertian-optimis-adalah-ini-manfaat-dan-cirinya#:~:text=Menurut%20KBBI%2C%20optimis%20adalah%20orang,Sikap%20optimis%20disebut%20dengan%20optimisme.>

Kim, Jihyun. 2015. "Territorial Disputes in the South China Sea: Implications for Security in Asia and Beyond." *Strategic Studies Quarterly* 9, no. 2, 107–41. <http://www.jstor.org/stable/26271078>.

Kominfo, Pdsi. "Nawacita: 9 Program Perubahan Untuk Indonesia." Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Diakses 12 Desember 2023. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/5484/nawacita-9-program-perubahan-untuk-indonesia/0/infografis>.

Kominfo, Pdsi. "Presiden: Kebijakan Pemerataan Ekonomi Untuk Atasi Ketimpangan." Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Diakses 12 Desember 2023. https://www.kominfo.go.id/content/detail/9566/presiden-kebijakan-pemerataan-ekonomi-untuk-atasi-ketimpangan/0/artikel_gpr.

Kominfo, Pdsi. "Presiden: Kelola Uang Rakyat Secara Transparan Dan Akuntabel." Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Diakses 12 Desember 2023. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35280/presiden-kelola-uang-rakyat-secara-transparan-dan-akuntabel/0/berita>.

- Kuś, Rafal. "Our Grief and Anger': George W. Bush's Rhetoric in the Aftermath of 9/11 as Presidential Crisis Communication." *Res Rhetorica* 7, no. 1 (2020): 45–60. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=846730>.
- Leep, Matthew C. 2010. "The Affective Production of Others: United States Policy towards the Israeli-Palestinian Conflict." *Cooperation and Conflict* 45, no. 3 (2010): 331–52. <http://www.jstor.org/stable/45084612>.
- Macaraig, Christine Elizabeth, and Adam James Fenton. "Analyzing the Causes and Effects of the South China Sea Dispute: Natural Resources and Freedom of Navigation." *The Journal of Territorial and Maritime Studies* 8, no. 2 (2021): 42–58. <https://www.jstor.org/stable/48617340>.
- Madrim, Sasmito. "Ylbhi Sebut 27 Kebijakan Jokowi Bersifat Otoriter." *VOA Indonesia*, 15 Juni 2020. <https://www.voaindonesia.com/a/ylbhi-sebut-27-kebijakan-jokowi-bersifat-otoriter/5462870.html>.
- Meiliana, Diamanty. "Jaga Kedaulatan Laut Natuna, Indonesia Siagakan 4 Kapal Perang Dan 1 Pesawat Patroli Halaman All." *KOMPAS.com*, 16 Januari 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/16/11574221/jaga-kedaulatan-laut-natuna-indonesia-siagakan-4-kapal-perang-dan-1-pesawat?page=all>.
- Negara, Kementerian Sekretariat. "Presiden Jokowi: Pembangunan Perlu Proses Dan Perjuangan." Sekretariat Negara. Diakses 12 Desember 2023.

https://setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_pembangunan_perlu_proses_dan_perjuangan.

Negara, Kementerian Sekretariat. “Presiden Tegaskan Pemerintah Terus Perbaiki Sistem Cegah Korupsi.” Sekretariat Negara. Diakses 12 Desember 2023. https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_tegaskan_pemerintah_terus_perbaiki_sistem_cegah_korupsi.

Nuans Asa Septari B., Gistyger Hasudungan Manullang, Aura Fatimah Azzahra S., Bernadine Grace Alvania M., and Gracella Martauli Lumbantoruan. “Respon Indonesia Menghadapi Ancaman Cina Di Laut Natuna Utara Di Masa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo.” *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 1 (2022): 10–18. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i1.267>.

ODGAARD, LISELOTTE. “The South China Sea: ASEAN’s Security Concerns About China.” *Security Dialogue* 34, no. 1 (2003): 11–24. <http://www.jstor.org/stable/26298118>.

Peraturan BPK. Perpres No. 41 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara [JDIH BPK RI]. diakses pada 4 Mei 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/206049/perpres-no-41-tahun-2022#:~:text=PERPRES%20No.%2041%20Tahun%202022>.

Pham, Min Van. “Vietnam and the South China Sea Dispute: Sovereign Claim, Energy Security and Joint Development Agreement.” *The Journal of*

Territorial and Maritime Studies 1, no. 2 (2014): 51–69.
<https://www.jstor.org/stable/26664005>.

Putra D. T., dan Rosyidin, M. 2019. "Pengaruh Kepribadian Presiden Jokowi dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Pelanggaran Cina di Natuna." *Journal of International Relations* 5, no. 2, 323-331.
<https://doi.org/10.14710/jirud.v5i2.23627>.

Putranto, Gayuh Nugroho, Muhammad Zid, and Mieke Miarsyah. "Maritime Limit Conflict, Illegal Fishing and Enforcement of Effort in Natuna Sea Region between Indonesia and China." *Jurnal Perikanan dan Kelautan* 9, no. 2 (2019): 185. <https://doi.org/10.33512/jpk.v9i2.7243>.

Roberts, Christopher B., and Malcolm Cook. "BRUNEI DARUSSALAM: Challenging Stability." *Southeast Asian Affairs*, 2016, 95–106.
<https://www.jstor.org/stable/26466921>.

S, Jauh Hari Wawan. "Cerita Tentang Jokowi Saat Naik Gunung: Izin Pacar-Pernah Dikira Maling Sapi." *detikjateng*. Diakses 12 Desember 2023.
<https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6344557/cerita-tentang-jokowi-saat-naik-gunung-izin-pacar-pernah-dikira-maling-sapi>.

SARAVANAMUTTU, JOHAN. "MALAYSIA'S POLICIES AND INTERESTS IN THE SOUTH CHINA SEA: DEVELOPMENTS, SUCCESSES, AND FAILURES." S. Rajaratnam School of International Studies, 2021.
<http://www.jstor.org/stable/resrep40185>.

- Safruddin. Pengaruh Kepribadian Terhadap Kinerja Pegawai Pada kantor Kejaksaan Negeri Kendari, 2023. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mrfbw>.
- Saragih, Hendra Maujana. "Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Konflik Laut China Selatan." *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* 8, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.34010/jipsi.v8i1.880>.
- Setiawan, Ebta. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." Arti kata ambiguitas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 12 Desember 2023. <https://kbbi.web.id/ambiguitas>.
- Setiawan, Ebta. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." Arti kata egois - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 12 Desember 2023. <https://kbbi.web.id/egois>.
- Setiawan, Ebta. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." Arti kata imajinatif - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 12 Desember 2023. <https://www.kbbi.web.id/imajinatif>.
- Setiawan, Ebta. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." Arti kata optimis - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 12 Desember 2023. <https://kbbi.web.id/optimis>.
- Setiawan, Ebta. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." Arti kata pemimpi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 12 Desember 2023. <https://kbbi.web.id/pemimpi>.

Setiawan, Ebta. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Arti kata pribadi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 12 Desember 2023. <https://kbbi.web.id/pribadi>.

Setiawan, Ebta. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Arti kata ramah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 12 Desember 2023. <https://kbbi.web.id/ramah>.

Setiawan, Ebta. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Arti kata rapi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 12 Desember 2023. <https://kbbi.web.id/rapi>.

Setiawan, Ebta. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Arti kata sopan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 12 Desember 2023. <https://kbbi.web.id/sopan>.

Setiawan, Ebta. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Arti kata sosialisasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 12 Desember 2023. <https://kbbi.web.id/sosialisasi>.

Setiawan, Ebta. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Arti kata suka - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 12 Desember 2023. <https://kbbi.web.id/suka>.

Setiawan, Ebta. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Arti kata teguh - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 12 Desember 2023. <https://kbbi.web.id/teguh>.

Setiawan, Ebta. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." Arti kata tertib - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 12 Desember 2023.
<https://kbbi.web.id/tertib>.

Setiawan, Ebta. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." Arti kata tim - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 12 Desember 2023.
<https://kbbi.web.id/tim>.

Setiyadi, Bima. "Kip Jokowi Terbukti Bawa Dampak Positif Bagi Pendidikan." SINDOnews Daerah, 4 Oktober 2022.
<https://daerah.sindonews.com/read/903351/174/kip-jokowi-terbukti-bawa-dampak-positif-bagi-pendidikan-1664878258>.

Setuningsih, Novianti. "Deretan Alutsista Yang Dikerahkan TNI al Dalam Latihan Armada Jaya 2023: Kapal Selam, Helikopter Hingga Ranpur." KOMPAS.com, 30 Juni 2023.
<https://nasional.kompas.com/read/2023/06/30/13172981/deretan-alutsista-yang-dikerahkan-tni-al-dalam-latihan-armada-jaya-2023>.

Situmorang, M. 2015. "Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Di Bawah Pemerintahan Jokowi-JK." Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 11, no. 1, <https://doi.org/10.26593/jihi.v11i1.1442.%p>.

Sukma, R., dan Usman, A. 1997. "Konflik Laut Cina Selatan : Tantangan Bagi Asean," Indonesia:Centre for Strategic and International Studies,

Sulistiyani, Dwi, and Mukaromah Mukaromah. "Gaya Retorika Kepala Negara Ri: Analisis Komparatif Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Dan Joko Widodo." *Jurnal Audience* 1, no. 1 (2018): 31–44. <https://doi.org/10.33633/ja.v1i1.2682>.

Sulistiyani, Y. A., Pertiwi, A. C., dan Sari, M. I. 2021. "Indonesia's Responses toward the South China Sea Dispute during Joko Widodo's Administration." *Dinamika Masalah Politik dalam Negeri & Hubungan Internasional (POLITICA)* 12, no.1, 84-101, [10.22212/jp.v12i1.2149](https://doi.org/10.22212/jp.v12i1.2149).

Sulistiyani, Yuli Ari, Andhini Citra Pertiwi, and Marina Ika Sari. "Indonesia's Responses amidst the Dynamic of the South China Sea Dispute under Jokowi's Administration [Respons Indonesia Di Tengah Dinamika Sengketa Laut China Selatan Di Bawah Pemerintahan Jokowi]." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 12, no. 1 (2021): 85–103. <https://doi.org/10.22212/jp.v12i1.2149>.

Sulistiyani, Yuli, Andhini, dan Marina. 2021. "Indonesia's Responses amidst the Dynamic of the South China Sea Dispute under Jokowi's Administration [Respons Indonesia Di Tengah Dinamika Sengketa Laut China Selatan Di Bawah Pemerintahan Jokowi]." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 12, no.1, 85–103. <https://doi.org/10.22212/jp.v12i1.2149>.

Suryadi, U. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 170.

Suryadinata, L. 2017. "What Does Indonesia's Renaming of Part of the South China Sea Signify?"
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_64.pdf.

Terapkan Industri Hijau, Sektor Manufaktur hemat energi hingga Rp3,2 ...
Accessed December 12, 2023.
<https://kemenperin.go.id/artikel/22970/Terapkan-Industri-Hijau,-Sektor-Manufaktur-Hemat-Energi-Hingga-Rp3,2-Triliun>.

Thayer, Carlyle A. "ASEAN, China and the Code of Conduct in the South China Sea." *The SAIS Review of International Affairs* 33, no. 2 (2013): 75–84.
<https://www.jstor.org/stable/26995402>.

Tri Andika, Muhammad, and Allya Nur Aisyah. "Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China Di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi Dan Kedaulatan?" *Indonesian Perspective* 2, no. 2 (2017): 161.
<https://doi.org/10.14710/ip.v2i2.18477>.

United Nations, 1982, "United Nations Convention on the Law of the Sea," United Nations,
https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf.